



Indonesian Journal of Economics,
Management and Accounting

Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting

Vol. 1, No. 11, November 2024

Hal 1248-1261

E-ISSN : 3032-0550

P-ISSN : 3032-1891

Site : <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema>

Pengaruh Translasi Mata Uang Asing Terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi: Perbandingan Antara PSAK Dan IFRS

M. Masrukhan¹, Ai Siti Aisyah², Citta Anisa Hasna³, Tiara Minnatul Maula⁴
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati, Cirebon, Indonesia

Article Info

Article history:

Received November 8, 2024

Revised November 8, 2024

Accepted November 18, 2024

Kata Kunci:

Translasi,
Mata Uang Asing,
Kurs,
Laporan Konsolidasi

Keywords:

Translation,
Foreign Currency,
Exchange Rate,
Consolidated Report

ABSTRAK

PSAK 10, yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, mengatur bagaimana perusahaan dalam mencatat transaksi yang melibatkan mata uang asing serta menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan. IAS 21 dan PSAK 10 mengatur perlakuan akuntansi terkait dampak fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap laporan keuangan. Standar ini berfokus pada cara mencatat transaksi dengan kurs nilai tukar spot dan bagaimana mencantumkan selisih kurs dalam laporan laba rugi. Selain itu, IAS 21 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) menetapkan pedoman bagi entitas internasional untuk menerjemahkan laporan keuangan dari mata uang fungsional ke mata uang penyajian. Standar ini mengharuskan penggunaan mata uang fungsional yang mencerminkan kondisi ekonomi utama organisasi selain mengakui perbedaan kurs dalam pendapatan komprehensif lainnya yang berkaitan dengan operasi di luar negeri. IAS 21 mencakup prosedur konversi, menangani perubahan kurs pada aset dan kewajiban, dan efek perubahan kurs pada pajak. PSAK 10 dan IAS 21 memiliki peran krusial dalam memastikan laporan keuangan disusun secara akurat dan konsisten di tengah perubahan nilai tukar internasional. Mereka memberikan panduan penting bagi entitas dalam menyajikan posisi keuangan yang menunjukkan dampak nyata dari transaksi dan investasi luar negeri mereka.

ABSTRACT

PSAK 10, issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board, regulates how companies record transactions involving foreign currencies and determine their impact on financial statements. IAS 21 and PSAK 10 regulate the accounting treatment related to the impact of foreign exchange rate fluctuations on financial statements. This standard focuses on how to record transactions at the spot exchange rate and how to include exchange rate differences in the profit and loss statement. In addition, IAS 21 issued by the International Accounting Standards Board (IASB) sets out guidelines for international entities to translate financial statements from functional currency to presentation currency. This standard requires the use of functional currency that reflects the primary economic conditions of the organization, in addition to recognizing exchange rate differences in other comprehensive income related to foreign operations. IAS 21 covers conversion procedures, addresses exchange rate changes on assets and liabilities, and the effects of exchange rate changes on taxes. PSAK 10 and IAS 21 play a crucial role in ensuring that financial statements are prepared accurately and consistently amidst changes in international exchange rates. They provide important guidance for entities in presenting financial positions that reflect the real impact of their foreign transactions and investments.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

M. Masrukhan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati,
Cirebon, Indonesia
Email: masrukhan8909@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perusahaan di berbagai industri semakin sering melakukan transaksi lintas negara di era globalisasi. Setiap transaksi internasional ini membawa tantangan akuntansi tambahan. Hal ini terutama relevan untuk pencatatan dan pelaporan keuangan yang melibatkan mata uang asing. Baik dalam pengakuan awal maupun laporan keuangan berkala, perubahan nilai tukar mata uang sangat memengaruhi nilai transaksi. PSAK 10, atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 10, dirilis oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Indonesia sebagai pedoman untuk mencatat dan melaporkan transaksi mata uang asing, adalah salah satu contoh dari standar akuntansi internasional dan lokal yang memberikan pedoman khusus mengenai efek Fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Standar ini dirancang untuk memastikan laporan keuangan entitas menggambarkan dampak perubahan nilai tukar mata uang secara tepat dan konsisten. PSAK 10 mengatur cara suatu organisasi mengukur, mencatat, dan menampilkan transaksi yang melibatkan mata uang asing, serta mengatur cara organisasi melaporkan perubahan nilai tukar yang diakibatkan oleh fluktuasi kurs.

Namun, *International Accounting Standard* No. 21, juga dikenal sebagai IAS 21, diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB) dan mengatur prosedur untuk mencatat dan menyusun laporan keuangan untuk entitas yang beroperasi di berbagai negara atau melakukan transaksi dalam berbagai mata uang. Standar ini mengatur cara entitas menentukan mata uang fungsionalnya, mencatat transaksi yang melibatkan mata uang asing, dan menunjukkan dampak perubahan kurs dalam laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang tepat dan dapat dipercaya sangat dipengaruhi oleh penerapan IAS 21 dan PSAK 10. Dengan menggunakan standar ini, entitas dapat memberikan informasi keuangan yang menunjukkan bagaimana perubahan nilai tukar mempengaruhi aset, liabilitas, pendapatan, dan biaya mereka. Laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan prinsip yang konsisten membantu pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan regulator, untuk lebih memahami kondisi keuangan dan kinerja bisnis di tengah perubahan nilai tukar global. Oleh karena itu, penelitian tentang pelaksanaan PSAK 10 dan IAS 21 sangat penting untuk memahami bagaimana entitas menerapkan standar ini dalam praktiknya dan bagaimana hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan. Memahami kedua standar ini akan membantu bisnis menyusun laporan keuangan yang memenuhi persyaratan akuntansi internasional, meningkatkan kredibilitas dan transparansi bagi pengguna laporan keuangan

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana perubahan nilai tukar mata uang asing memengaruhi penerapan IAS 21 dan PSAK 10 dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini, metode berikut digunakan untuk mengumpulkan data:

2.1. Studi Kepustakaan (Literature Review)

Studi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang konsep, prinsip, dan peraturan yang terkandung dalam IAS 21 dan PSAK 10, yang keduanya diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). “IAS 21: Dampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing” dan “PSAK 10: Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing” adalah subjek utama penelitian ini.

2.2. Analisis Komparatif Standar (Comparative Analysis)

Peneliti memeriksa hubungan dan perbedaan antara IAS 21 dan PSAK 10 dengan memperhatikan bagaimana keduanya serupa dan berbeda dalam penerapan standar di tingkat domestik dan internasional. (1) Variasi dalam istilah, definisi, dan lingkup standar kedua dibahas dalam penelitian ini. (2) Strategi untuk menentukan mata uang fungsional dan penyajian, serta dampaknya pada berbagai organisasi ekonomi. (3) Metode untuk mengonversi transaksi mata uang asing dan mengelola selisih kurs, baik dalam laporan keuangan konsolidasi maupun entitas yang tidak terlibat dalam bisnis internasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Mata Uang Asing

Setiap negara memiliki mata uang mereka sendiri. Indonesia adalah salah satunya, yang menetapkan Rupiah sebagai mata uang resmi untuk transaksi. Secara umum, mata uang asing atau valuta asing, merujuk pada jenis mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran di negara atau wilayah ekonomi yang berbeda dari negara asalnya. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dapat dihitung dan diselesaikan menggunakan mata uang asing tersebut.[1] Jenis mata uang yang biasanya digunakan oleh suatu entitas termasuk dalam tiga kategori, menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Ini adalah: (1) Mata uang fungsional, yaitu mata uang yang digunakan dalam lingkungan ekonomi utama tempat perusahaan beroperasi; (2) Mata uang penyajian, yaitu mata uang yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan; dan (3) Mata uang asing, yaitu mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional yang digunakan oleh perusahaan dalam transaksi.[2]

3.2. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing merujuk pada transaksi yang nilainya dihitung dalam mata uang asing dan harus diselesaikan menggunakan mata uang asing tersebut. Sebagai contoh, transaksi yang melibatkan mata uang asing adalah sebagai berikut: (1) Peminjaman dan pinjaman uang atau pendanaan yang sangat memerlukan penyelesaian menggunakan mata uang asing; (2) Pembelian atau penjualan barang atau jasa di mana pembayaran atau kompensasinya dilakukan sebagian besar dalam mata uang asing; dan (3) Transaksi di mana perusahaan menerima pembayaran atau pemberian dalam mata uang asing.[3]

Istilah-istilah yang sering digunakan dalam Transaksi Mata Uang Asing: (1) Mata uang entitas pelaporan adalah mata uang yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Laporan tersebut disusun dalam Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. (2) Nilai wajar merujuk pada jumlah yang diperlukan untuk menukar aset atau menyelesaikan kewajiban antara dua pihak yang berkeinginan dan memiliki pemahaman yang memadai tentang transaksi yang dilakukan. (3) Pos-pos moneter atau pos-pos moneter dalam neraca pemerintah adalah aset atau kewajiban yang nilainya tetap atau dapat ditentukan, dan diukur dalam satuan mata uang tertentu. (4) Selisih kurs adalah perbedaan dalam nilai tukar antara dua mata uang.[4]

3.3. Fluktuasi Kurs

Saat melakukan transaksi valuta asing, nilai kurs valuta asing dapat berubah kapan saja. Ini biasanya terdiri dari dua jenis perubahan: (1) Apresiasi atau depresiasi, yang menggambarkan peningkatan nilai mata uang suatu negara, sementara depresiasi menunjukkan penurunan nilainya; dan (2) Evaluasi atau devaluasi, yang merujuk pada perubahan naik atau turunnya nilai mata uang suatu negara.[5]

3.4. Penyajian Selisih Kurs

Kas, piutang, dan utang dalam valuta asing muncul ketika perusahaan melakukan transaksi internasional dalam mata uang asing. Pada setiap tanggal pelaporan, pos moneter tersebut harus dilaporkan dengan menggunakan kurs penutupan. Sebagai pertimbangan praktis, jika nilai tukar yang tepat sulit diperoleh, sering kali digunakan kurs rata-rata selama periode tersebut sebagai pengganti nilai tukar aktual untuk penjabaran.[6]

3.5. Translasi

Konversi melibatkan pertukaran fisik antara dua mata uang, sedangkan translasi hanya merujuk pada perubahan bentuk ekspresi moneter, seperti mengubah nilai neraca dari *poundsterling* ke dolar AS. Translasi dilakukan dengan tujuan agar: (1) Pengguna laporan keuangan dapat memperoleh pemahaman yang lengkap mengenai aktivitas operasional perusahaan, baik yang berlangsung di dalam negeri maupun di luar negeri. (2) Karena banyaknya metode translasi yang dapat dipilih oleh perusahaan, pengunggahan informasi yang jelas diperlukan untuk menunjukkan laba atau rugi yang disebabkan oleh translasi.

3.6. PSAK No. 4 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasi

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 4 tahun 1991, laporan keuangan konsolidasi disusun untuk menggambarkan posisi dan kegiatan sebuah perusahaan yang terdiri dari beberapa entitas yang saling terkait. Sebuah entitas pengendali dianggap memiliki kendali apabila menguasai lebih dari 50% saham yang beredar. Dalam laporan keuangan konsolidasi, perusahaan induk menggabungkan laporan keuangan dengan anak perusahaan biasanya memiliki tahun fiskal yang berbeda. Dalam kasus ini, laporan akan menyesuaikan dengan tahun fiskal perusahaan induk.[7]

3.7. PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah rangkaian pedoman akuntansi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). PSAK No. 10 adalah pernyataan yang mengatur pengaruh perubahan nilai tukar mata uang asing, yang terakhir diperbarui pada tahun 2010. Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan yang lebih baik sesuai dengan standar yang berlaku. PSAK 10, mengenai Dampak Perubahan Kurs Mata Uang Asing, disetujui oleh DSAK pada 23 Maret 2010. Revisi PSAK 10 tentang Transaksi Valuta Asing yang pertama kali diterbitkan pada 7 September 1994. Selanjutnya, PSAK 10 diubah penomorannya menjadi PSAK 221, yang disahkan pada 12 Desember 2022 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan No. 10 didasarkan pada Standar Akuntansi Internasional (IAS) No. 21, yang membahas "Dampak Perubahan Nilai Tukar". Penerapan standar ini bertujuan untuk mengurangi potensi ketidaksesuaian dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, serta mendukung pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang dapat memengaruhi kelangsungan perusahaan (Putra, 2018). Perusahaan dapat melakukan transaksi valuta asing dengan dua cara, yaitu: (1) Dengan memperdagangkan mata uang asing atau menjalankan operasi bisnis di luar negeri, dan (2) Dengan menyusun laporan keuangan menggunakan mata uang asing.

Tujuan dari PSAK 10 adalah untuk mengatur bagaimana transaksi dalam mata uang asing dan aktivitas usaha luar negeri dicatat dalam laporan keuangan perusahaan, serta bagaimana laporan keuangan tersebut diterjemahkan ke dalam mata uang pelaporan. Standar ini mencakup: (a) Pengakuan transaksi dan saldo dalam mata uang asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif yang diatur oleh PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, (b) Penyajian hasil dan kondisi keuangan kegiatan usaha luar negeri yang dimasukkan dalam laporan keuangan entitas melalui metode konsolidasi atau ekuitas, dan (c) Penjabaran hasil serta posisi keuangan entitas ke dalam mata uang penyajian.

Menurut PSAK 10 (SAK IAI 2017), fluktuasi nilai tukar berpengaruh pada akuntansi selisih kurs. Perbedaan nilai tukar terjadi ketika sejumlah mata uang tertentu dikonversi ke mata uang lain dengan kurs yang berbeda. Ada tiga isu utama yang terkait dengan akuntansi selisih kurs: (1) Pengakuan awal transaksi, (2) Pengakuan nilai mata uang asing pada tanggal laporan posisi keuangan, dan (3) Perlakuan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perbedaan nilai tukar.

3.7.1. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang yang mencerminkan lingkungan ekonomi utama tempat perusahaan beroperasi, sementara mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan.[8] Mata uang fungsional perusahaan mencerminkan transaksi, kejadian, dan kondisi yang mendasarinya. Oleh karena itu, setelah ditentukan, mata uang fungsional hanya akan berubah jika ada perubahan signifikan dalam transaksi, kejadian, atau kondisi tersebut. Dalam menentukan mata uang fungsional, perusahaan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: (a) Mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, yang biasanya adalah mata uang yang digunakan dalam penetapan harga. (b) Mata uang yang paling berpengaruh terhadap biaya tenaga kerja,

material, dan biaya lainnya yang terkait dengan perolehan barang dan jasa, yang sering kali merupakan mata uang yang dipakai untuk menghitung dan melaporkan biaya-biaya tersebut.

Faktor-faktor berikut ini juga dapat menunjukkan mata uang fungsional: (a) Mata uang yang digunakan untuk menghasilkan dana melalui kegiatan pendanaan, seperti penerbitan instrumen utang dan ekuitas. (b) Mata uang yang umumnya digunakan untuk menyimpan laba operasional. Selain itu, ketika menentukan mata uang fungsional untuk kegiatan usaha luar negeri, perusahaan harus mempertimbangkan apakah mata uang fungsional tersebut sama dengan mata uang entitas pelapor (dalam hal ini, perusahaan itu sendiri). Aktivitas sebagai anak perusahaan, cabang, afiliasi, atau pengaturan bersama): (a) Apakah kegiatan bisnis internasional tersebut dilakukan sebagai bagian dari entitas pelapor tanpa memiliki tingkat otonomi yang signifikan. Sebagai contoh, aktivitas usaha luar negeri yang berfungsi sebagai perpanjangan dari entitas pelapor terjadi ketika usaha tersebut hanya menjual barang yang diimpor oleh entitas pelapor dan mengirimkan hasil penjualannya kembali kepada entitas pelapor. Contoh aktivitas bisnis asing yang dilakukan dengan otonomi yang besar adalah ketika aktivitas bisnis asing mengumpulkan kas dan aset keuangan lainnya, menimbulkan biaya, menghasilkan pendapatan, dan mengatur pembiayaan dalam mata uang domestik. (b) Apakah transaksi entitas pelapor melibatkan sebagian besar atau kecil aktivitas bisnis asing. (c) Apakah arus kas dari kegiatan usaha luar negeri berpengaruh langsung terhadap arus kas entitas pelapor dan dapat ditransfer ke entitas pelapor kapan saja. (d) Apakah arus kas dari operasi luar negeri cukup untuk memenuhi kewajiban yang ada atau yang diperkirakan tanpa perlu pendanaan dari entitas pelapor.

3.7.2. Pelaporan Transaksi Valuta Asing Ke Dalam Mata Uang Fungsional

3.7.2.1. Pengakuan awal

Transaksi mata uang asing adalah transaksi yang dinyatakan atau memerlukan penyelesaian dalam mata uang asing, yang meliputi situasi ketika suatu entitas: (a) Membeli atau menjual barang dan jasa yang harga atau biayanya ditentukan dalam mata uang asing. (b) Memberikan atau menerima pinjaman yang jumlah hutang atau piutangnya diukur dalam mata uang asing. (c) Mengakuisisi atau melepaskan aset, atau menciptakan atau menyelesaikan kewajiban dalam mata uang asing.[8]

Pada saat pengakuan awal, transaksi mata uang asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah yang terlibat dalam mata uang asing diterjemahkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs spot antara mata uang fungsional dan mata uang asing pada tanggal transaksi. Tanggal transaksi merujuk pada saat suatu transaksi memenuhi kriteria pengakuan menurut SAK. Sebagai alternatif praktis, sering kali digunakan kurs yang mendekati nilai tukar pada saat transaksi, seperti kurs rata-rata mingguan atau bulanan untuk semua transaksi valuta asing yang terjadi dalam periode tersebut. Namun, apabila fluktuasi nilai tukar sangat besar, penggunaan kurs rata-rata untuk periode tertentu tidaklah tepat.

3.7.2.2. Laporan akhir periode pelaporan berikutnya

Pada setiap akhir periode pelaporan: (a) Kurs penutupan digunakan untuk mencatat posisi mata uang asing. (b) Kurs pada saat transaksi digunakan untuk mencatat pos non-moneter yang diukur berdasarkan biaya mata uang asing yang tercatat sebelumnya. (c) Kurs pada tanggal pengukuran nilai wajar digunakan untuk mencatat pos non-moneter yang

dihitung berdasarkan nilai wajar mata uang asing. Nilai tercatat barang dihitung berdasarkan kriteria lain yang relevan. Sebagai contoh, sesuai PSAK 16, aset tetap bisa diukur dengan nilai wajar atau biaya historis. Nilai tercatat diubah ke mata uang fungsional sesuai ketentuan dalam pernyataan ini jika jumlahnya dihitung dalam mata uang asing.

Untuk menentukan nilai buku beberapa pos, perlu dilakukan perbandingan antara dua pos atau lebih. Sebagai contoh, jumlah inventaris yang tercatat dalam PSAK 14 adalah nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih, atau antara item inventaris itu sendiri. Demikian juga, sesuai dengan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset, nilai tercatat suatu aset yang menunjukkan tanda-tanda penurunan nilai adalah yang lebih rendah antara nilai tercatat sebelum mempertimbangkan kemungkinan kerugian penurunan nilai dan jumlah yang dapat dipulihkan. Jika aset tersebut merupakan aset non-uang yang dihitung dalam mata uang asing, nilai tercatatnya dapat dihitung dengan membandingkan: (a) Harga perolehan atau jumlah tercatat yang relevan, yang dijabarkan menggunakan kurs pada saat perolehan aset atau saat transaksi barang yang dinilai berdasarkan biaya perolehan; dan (b) Nilai realisasi bersih atau jumlah yang dapat dipulihkan yang relevan. Pada tanggal tertentu, seperti harga penutupan pada akhir periode pelaporan, kurs yang berlaku akan digunakan untuk menentukan nilai ini. Perbandingan ini bisa menyebabkan nilai dalam mata uang fungsional berkurang, tetapi tidak dalam mata uang asing, atau sebaliknya.

Jika terdapat lebih dari satu nilai tukar, nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar di mana arus kas di masa depan yang tercermin dalam transaksi atau saldo dapat diselesaikan jika arus kas tersebut terjadi pada tanggal penilaian. Apabila opsi pertukaran antara dua mata uang sementara tidak tersedia, nilai tukar tertinggi berikutnya yang memungkinkan pertukaran akan digunakan sebagai nilai tukar yang berlaku.

3.7.3. Pengakuan Selisih Kurs

PSAK 71 mengatur tentang “Instrumen Keuangan” terkait akuntansi lindung nilai untuk mata uang asing, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 10 paragraf 03(a) dan 05. Dalam penerapan akuntansi lindung nilai, entitas perlu mempertimbangkan beberapa perbedaan dalam penjabaran, selain menangani perbedaan penjabaran yang diwajibkan oleh standar ini. Sebagai contoh, PSAK 71 mengharuskan bahwa selisih penjabaran item moneter yang dianggap sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai arus kas diakui terlebih dahulu dalam penghasilan komprehensif lain, selama lindung nilai tersebut efektif. Apabila suatu pos moneter dipertanggungjawabkan atau dijabarkan dengan kurs yang berbeda dari kurs pada saat penjabaran, maka selisih kurs akan timbul jika pertama kali diakui dalam periode pelaporan keuangan yang bersangkutan, atau jika sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi untuk periode berjalan, kecuali diatur berbeda dalam PSAK 10 paragraf 32.

Jika uang berasal dari transaksi valuta asing dan terjadi perubahan nilai tukar pada tanggal transaksi, maka nilai tukarnya akan berbeda pada tanggal penyelesaian. Jika transaksi terjadi dalam periode akuntansi yang sama dengan tanggal transaksinya, perbedaan kurs akan dicatat dalam periode akuntansi tersebut. Namun, jika transaksi diselesaikan pada periode fiskal berikutnya, perbedaan kurs yang tercatat akan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar selama periode fiskal tersebut.

Jika laba atau rugi dari item non-moneter dimasukkan dalam penghasilan komprehensif lain, maka bagian dari selisih kurs yang terkait dengan laba atau rugi tersebut juga akan

dimasukkan dalam penghasilan komprehensif lain. Sebaliknya, jika keuntungan atau kerugian dari pos non-moneter diakui dalam laba rugi, bagian dari keuntungan atau kerugian tersebut akan dicatat dalam laba rugi sebagai elemen dari perbedaan nilai tukar. PSAK lainnya menyatakan bahwa keuntungan dan kerugian harus dicatat dalam penghasilan komprehensif lain. Sebagai contoh, PSAK 16 yang membahas aset tetap, mengatur bahwa sebagian keuntungan dan kerugian dari revaluasi aset tetap harus dimasukkan dalam penghasilan komprehensif lain. Dalam hal aset dinilai dalam mata uang asing, Pasal 23(c) mengharuskan jumlah yang dinilai kembali untuk dijabarkan dengan nilai tukar pada saat penilaian, sehingga perbedaan kurs juga dicatat dalam penghasilan komprehensif lain. Laporan keuangan khusus mencakup selisih penjabaran yang timbul dari pos moneter yang merupakan bagian dari investasi bersih entitas pelapor dalam operasi luar negeri (lihat PSAK 10 paragraf 15). Dalam laporan keuangan yang mencakup kegiatan usaha luar negeri dan entitas pelapor (seperti laporan keuangan konsolidasi di mana anak perusahaan adalah bisnis luar negeri), perbedaan penjabaran awalnya dicatat dalam penghasilan komprehensif lain dan dikurangkan dari investasi bersih.

Jika pos moneter merupakan bagian dari investasi bersih entitas pelapor pada operasi luar negeri dan dihitung dalam mata uang fungsional entitas pelapor, perbedaan kurs akan disajikan dalam laporan keuangan terpisah untuk entitas pelapor. Jika pos moneter dihitung dalam mata uang fungsional dari kegiatan usaha luar negeri, perbedaan penjabaran akan disajikan dalam laporan keuangan terpisah untuk operasi luar negeri tersebut. Untuk kegiatan usaha luar negeri atau entitas pelapor, perbedaan nilai tukar akan dicatat dalam laporan keuangan terpisah untuk keduanya. Perbedaan nilai tukar ini akan tercatat dalam laporan keuangan penghasilan komprehensif lain yang mencakup baik operasi luar negeri maupun entitas pelapor (yaitu, laporan keuangan yang mengkonsolidasikan kegiatan usaha luar negeri atau menggunakan metode ekuitas). Semua jumlah yang dijelaskan dalam PSAK 10 paragraf 20 hingga 26 harus dikonversi ke mata uang fungsional saat menyusun laporan keuangan jika organisasi menggunakan mata uang selain mata uang fungsional. Hal ini akan menghasilkan jumlah yang sama dalam mata uang fungsional, sebagaimana tercatat saat pertama kali item tersebut dibuat dalam mata uang fungsional. Sebagai contoh, kurs penutupan akan digunakan untuk mengkonversi item moneter ke mata uang fungsional, dan kurs pada tanggal transaksi akan digunakan untuk mengkonversi item non-moneter yang diukur berdasarkan biaya historis.

3.7.4. Perubahan Mata Uang Fungsional

Entitas harus menerapkan prosedur penjabaran ke mata uang fungsional yang baru secara prospektif mulai dari tanggal perubahan mata uang fungsional. Mata uang fungsional mencerminkan transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mendasari entitas tersebut, sehingga hanya dapat diubah jika terjadi perubahan pada hal-hal yang mendasarinya. Sebagai contoh, jika mata uang yang paling mempengaruhi harga barang dan jasa mengalami perubahan, maka mata uang fungsional juga bisa berubah.[8] Perubahan mata uang fungsional hanya mempengaruhi efek secara prospektif. Dengan kata lain, nilai tukar pada saat perubahan digunakan untuk mengonversi semua item ke mata uang fungsional yang baru. Item non-moneter yang tercatat akan dianggap berdasarkan biaya historisnya. Perbedaan penjabaran yang dihasilkan dari kegiatan usaha luar negeri yang sebelumnya diakui dalam penghasilan

komprehensif lain tidak akan dipindahkan dari ekuitas ke laba rugi hingga kegiatan usaha luar negeri tersebut dihentikan.

3.7.5. Penggunaan Mata Uang Penyajian Selain Mata Uang Fungsional

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya. Namun, jika mata uang penyajian berbeda, perusahaan harus menerjemahkan hasil dan posisi keuangan ke dalam mata uang tersebut. Sebagai contoh, jika sebuah grup perusahaan memiliki divisi-divisi dengan mata uang fungsional yang berbeda, mereka dapat melihat kinerja dan posisi keuangan mereka dalam laporan keuangan konsolidasi. Untuk menggambarkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan yang mata uang fungsionalnya bukan berasal dari ekonomi hiperinflasi, langkah-langkah berikut diterapkan: (a) Semua aset dan kewajiban dalam neraca, termasuk data perbandingan, dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan pada tanggal neraca; (b) Pendapatan, beban, dan penghasilan komprehensif lainnya, termasuk data perbandingan, dijabarkan dengan kurs penutupan pada tanggal laporan laba rugi; (c) Selisih penjabaran dicatat dalam penghasilan komprehensif lainnya.

Untuk keperluan praktis, pendapatan dan beban biasanya dihitung menggunakan kurs yang mendekati kurs transaksi, seperti kurs rata-rata selama periode tersebut. Namun, penggunaan nilai rata-rata periode tersebut bisa tidak akurat jika nilai tukar mengalami fluktuasi yang signifikan. Perbedaan dalam penjabaran yang dijelaskan pada poin (c) disebabkan oleh dua faktor utama: (a) Penjabaran aset dan liabilitas menggunakan kurs penutupan, sementara pendapatan dan beban dijabarkan dengan kurs pada saat transaksi; dan (b) Perubahan saldo awal ekuitas menjadi nilai penutupan yang berbeda dari nilai penutupan sebelumnya. Karena perubahan nilai tukar tidak berdampak langsung signifikan pada arus kas saat ini atau masa depan dari entitas luar negeri, perubahan tersebut tidak diakui dalam laporan laba rugi. Selisih penjabaran kumulatif akan dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas yang terpisah hingga kegiatan usaha luar negeri tersebut dijual. Jika selisih penjabaran terkait dengan kegiatan usaha luar negeri yang dikonsolidasi namun tidak sepenuhnya dimiliki, selisih tersebut akan dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali dan dicatat dalam neraca konsolidasi bagian kepentingan non-pengendali.

Laporan keuangan perusahaan harus disesuaikan dengan PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi apabila mata uang fungsionalnya berasal dari ekonomi yang mengalami hiperinflasi. Entitas tidak diperbolehkan untuk menghindari penyesuaian yang ditetapkan oleh PSAK 63 dengan menggunakan mata uang selain mata uang fungsional yang ditentukan berdasarkan standar ini (misalnya, mata uang fungsional perusahaan induk). Hasil dan posisi keuangan perusahaan yang mata uang fungsionalnya berasal dari ekonomi hiperinflasi harus dikonversi ke mata uang penyajian lain dengan langkah-langkah berikut: (a) Kurs penutupan pada tanggal neraca terakhir digunakan untuk mengonversi semua nilai termasuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban (termasuk nilai komparatif) kecuali (b) Jika jumlah tersebut dikonversi ke mata uang negara yang tidak mengalami hiperinflasi, jumlah komparatif adalah angka tahun berjalan yang tercatat dalam laporan keuangan tahun sebelumnya yang relevan meskipun terjadi perubahan dalam tingkat harga atau nilai tukar setelah periode tersebut.

3.7.6. Pengaruh Pajak Dari Seluruh Selisih Kurs

Perpajakan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan bisnis, termasuk operasi luar negeri, karena fluktuasi nilai tukar dan transaksi mata uang asing. Pajak penghasilan (PSAK 46: Pajak penghasilan) dibayar sesuai dengan dampak pajak tersebut.[8]

3.8. IAS 21: Dampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

IAS 21 Dampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing menjelaskan cara menerjemahkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian dan memperhitungkan transaksi serta kegiatan valuta asing dalam laporan keuangan. Setiap entitas harus menentukan mata uang fungsional untuk setiap operasinya berdasarkan lingkungan ekonomi utama tempat entitas tersebut beroperasi. Untuk mencatat transaksi valuta asing, biasanya menggunakan tingkat konversi spot ke mata uang fungsional pada tanggal transaksi.[9]

IAS 21 Dampak Perubahan Nilai Tukar Asing pertama kali dirilis oleh Komite Standar Akuntansi Internasional pada bulan Desember 1983, dan diterima oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) pada bulan April 2001. Pada bulan Juli 1983, IAS 21 Akuntansi untuk Dampak Perubahan Nilai Tukar Asing digantikan oleh IAS 21 Dampak Perubahan Nilai Tukar Asing. Pada bulan Desember 2003, IASB merilis versi yang lebih baru dari IAS 21 sebagai bagian dari rencana proyek teknis awalnya. Tiga interpretasi terkait yang ditambahkan ke dalam revisi IAS 21 adalah SIC-11 Valuta Asing-Kapitalisasi Kerugian Akibat Devaluasi Mata Uang yang Parah, SIC-19 Mata Uang Pelaporan-Pengukuran dan Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan IAS 21 dan IAS 29, dan SIC-30 Mata Uang Pelaporan-Penerjemahan dari Mata Uang Pengukuran ke Mata Uang Penyajian adalah tiga Interpretasi terkait yang juga dimasukkan ke dalam IAS 21 yang direvisi. Selain itu, Dewan mengubah SIC-7: Pengenalan Euro.

Pada bulan Desember 2005, IASB memodifikasi IAS 21 untuk mengamanatkan bahwa perbedaan nilai tukar tertentu yang timbul dari item moneter harus dianggap sebagai ekuitas secara terpisah. Ini adalah perubahan kecil namun signifikan dibandingkan dengan standar lainnya.[10]

Tujuan IAS 21 adalah untuk menetapkan prosedur untuk mengubah laporan keuangan menjadi mata uang penyajian serta untuk memasukkan transaksi dan aktivitas di luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas tertentu. [IAS 21.1] Tujuan utama IAS 21 adalah untuk menentukan nilai tukar atau kurs yang akan digunakan dan bagaimana perubahan nilai tukar berdampak pada laporan keuangan. [IAS 21.2]

3.8.1. Langkah Dasar untuk Menerjemahkan Jumlah Mata Uang Asing Menjadi Mata Uang Fungsional

Langkah-langkah ini diterapkan pada bisnis yang berdiri sendiri, perusahaan dengan operasi internasional (seperti perusahaan induk yang memiliki anak perusahaan di luar negeri), atau perusahaan dengan kegiatan di luar negeri (seperti cabang atau entitas anak). (1)Entitas pelapor menetapkan mata uang fungsionalnya. (2)Setiap transaksi dalam mata uang asing dikonversi ke mata uang fungsional entitas. (3)Perusahaan melaporkan hasil konversi sesuai dengan ketentuan pada paragraf 20-37 [melaporkan transaksi mata uang asing dalam mata uang fungsional] dan 50 [melaporkan dampak pajak dari selisih kurs].

3.8.2. Transaksi Mata Uang Asing

Nilai tukar asli saat transaksi digunakan untuk mencatat transaksi valuta asing dapat menggunakan nilai tukar rata-rata selama itu merupakan perkiraan yang wajar dari nilai tukar riil. [IAS 21.21] Pada setiap tanggal neraca berikutnya: [IAS 21.23] Untuk melaporkan jumlah valuta asing, kurs penutupan harus digunakan; Untuk melaporkan pos non-moneter yang diakui berdasarkan biaya historis, kurs yang berlaku pada tanggal transaksi harus diterapkan, sementara kurs yang berlaku saat nilai wajar ditentukan harus diungkapkan. Dengan satu pengecualian penting, dalam laba rugi periode tersebut terdapat perbedaan kurs yang terjadi saat pos moneter diselesaikan atau saat pos tersebut ditranslasikan ke dalam kurs yang berbeda dari kurs saat pertama kali diakui atau dicatat dalam laporan keuangan sebelumnya. [IAS 21.28] Dalam laporan keuangan konsolidasi yang mencakup operasi luar negeri, perbedaan kurs pada pos moneter yang mencakup investasi bersih entitas pelaporan dalam operasi tersebut dicatat dalam pendapatan komprehensif lainnya. Perbedaan kurs akan dicatat dalam laba rugi setelah investasi bersih dikeluarkan. [IAS 21.32]

Mata uang pos moneter yang merupakan bagian dari investasi entitas pada usaha asing tidak boleh memengaruhi perlakuan akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi [IAS 21.33]. Selain itu, akuntansi tidak boleh dipengaruhi oleh organisasi kelompok yang menangani bisnis di luar negeri. [IAS 21.15A] Setiap elemen selisih kurs dari keuntungan atau kerugian atas pos non-moneter yang dicatat dalam pendapatan komprehensif lain (seperti revaluasi properti berdasarkan IAS 16) juga dicatat dalam pendapatan komprehensif lainnya. [IAS 21.30]

3.8.3. Menerjemahkan Dari Mata Uang Fungsional Ke Mata Uang Asing

Prosedur berikut diterapkan untuk mengubah status keuangan dan hasilnya menjadi mata uang penyajian yang berbeda dalam kasus di mana mata uang fungsional entitas bukan merupakan mata uang dari ekonomi yang mengalami hiperinflasi. [IAS 21.39] Setiap aset dan kewajiban neraca, termasuk perbandingan, diubah menjadi kurs penutupan pada tanggal neraca. Ini mencakup goodwill yang timbul dari akuisisi perusahaan asing, serta penyesuaian nilai wajar terhadap nilai tercatat aset dan kewajiban yang dihasilkan dari akuisisi tersebut, yang dianggap sebagai aset dan kewajiban milik perusahaan asing. [IAS 21.47] Setiap laporan laba rugi, beserta perbandingannya, mencerminkan pendapatan dan biaya yang dihitung dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi, sementara selisih nilai tukar yang timbul dicatat dalam pendapatan komprehensif lain.

Ketika sebuah perusahaan mengubah status keuangan dan kinerjanya ketika mengonversi dari mata uang ekonomi hiperinflasi ke mata uang penyajian yang berbeda, terdapat peraturan khusus yang harus diterapkan. [IAS 21.42 - 43] Laporan keuangan entitas asing harus dinyatakan kembali sesuai dengan IAS 29 Penyajian Laporan Keuangan dalam Kondisi Ekonomi Hiperinflasi sebelum disesuaikan dengan mata uang penyajian jika mereka melaporkan dalam mata uang ekonomi hiperinflasi. [IAS 21.36] Persyaratan IAS 21 mengenai transaksi dan penerjemahan laporan keuangan harus dipatuhi oleh negara-negara anggota Unit Eropa saat beralih dari mata uang nasional mereka ke Euro. Untuk menerjemahkan aset dan kewajiban moneter, kurs penutupan harus digunakan; perbedaan kurs yang dihasilkan dari penerjemahan kewajiban dalam mata uang yang berpartisipasi harus

disimpan dalam ekuitas; dan perbedaan kurs yang timbul dari penerjemahan kewajiban yang didominasi dalam mata uang yang setara harus disimpan : [SIC-7].

3.8.4. Pembuangan Operasi Asing

Jika operasi luar negeri dijual, perbedaan nilai tukar dari komponen ekuitas yang berbeda item yang berhubungan dengan bisnis internasional, yang tercatat dalam pendapatan komprehensif lain, akan dipindahkan ke laba rugi saat terjadi penjualan. [IAS 21.48]

3.8.5. Dampak Pajak dari Perbedaan Nilai Tukar

Untuk mempertimbangkannya, IAS 12 Pajak Penghasilan harus digunakan.

3.8.6. Penyingkapan

Perbedaan kurs yang diakui dalam laporan laba rugi (kecuali yang terkait dengan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar menurut IAS 39) [IAS 21.52(a)], perhitungan perbedaan kurs bersih antara awal dan akhir periode, serta perbedaan kurs yang tercatat dalam pendapatan komprehensif lainnya dan dicatat dalam berbagai komponen ekuitas [IAS 21.52(b)], mengungkapkan mata uang fungsional dan menjelaskan alasan mengapa mata uang fungsional dapat berbeda dari mata uang tersebut. [IAS 21.53]. Aktivitas luar negeri yang substansial atau perubahan mata uang fungsional entitas pelaporan, beserta justifikasi penyesuaiannya. [IAS 21.54] Suatu entitas hanya dapat menggunakan IFRS untuk menyatakan laporan keuangannya jika laporan tersebut memenuhi semua persyaratan dari setiap Standar yang berlaku (termasuk IAS 21), dan interpretasi diterapkan jika laporan keuangan disajikan menggunakan mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional. [IAS 21.55].

Perusahaan diperbolehkan menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya menggunakan mata uang yang berbeda dari mata uang yang dipakai atau diberikannya dengan hanya menerjemahkan semua nilai pada nilai tukar akhir periode. Sebagian orang menyebutnya penerjemahan sederhana. Data keuangan yang dihasilkan dari penerjemahan yang mudah tidak memenuhi semua IFRS, terutama IAS 21. Pengungkapan berikut diperlukan dalam hal ini: [IAS 21.57] [9]

4. KESIMPULAN

PSAK 10 dan IAS 21 memberikan pedoman lengkap bagi perusahaan untuk mengatasi masalah pelaporan keuangan yang timbul dari operasi dan transaksi internasional. Standar ini diperlukan perubahan nilai tukar mata uang asing dapat memiliki dampak yang besar terhadap nilai aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya perusahaan, yang pada gilirannya memengaruhi keandalan laporan keuangan.

PSAK 10, yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), mengatur bagaimana transaksi mata uang asing dicatat dan bagaimana fluktuasi nilai tukar mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Standar ini dibuat untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang berkaitan dengan selisih kurs konsisten dan akurat, sehingga pengguna Indonesia dapat menggunakannya. Standar ini mencakup banyak hal, seperti mencatat transaksi pertama kali dalam mata uang asing, mengukur kembali setiap transaksi yang dilakukan dalam mata uang asing, dan PSAK 10 memungkinkan entitas untuk

memberikan informasi yang lebih jelas tentang bagaimana perubahan nilai tukar berdampak pada laporan keuangannya, yang meningkatkan kredibilitas dan transparansi.

Sebaliknya, IAS 21 menyediakan kerangka akuntansi yang lebih luas yang dapat digunakan oleh organisasi yang beroperasi di berbagai negara. Mata uang fungsional yang paling mencerminkan kondisi ekonomi di sekitar mereka dapat dipilih dengan lebih mudah dengan bantuan IAS 21. Selain itu, standar ini mengatur metode untuk mengonversi laporan keuangan dari mata uang fungsional ke mata uang penyajian yang berbeda. Selain itu, standar ini mengatur pengakuan perbedaan kurs dalam laporan keuangan konsolidasi dan dampak perbedaan kurs pada operasi luar negeri. IAS 21 memberikan panduan tentang pengakuan kurs penutupan, kurs historis, dan kurs transaksi dalam menyajikan laporan yang konsisten dan dapat dibandingkan, meskipun perusahaan melakukan operasi internasional. Standar ini menjamin bahwa laporan keuangan perusahaan menggambarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya meskipun kurs mata uang asing berubah-ubah.

Secara keseluruhan, penerapan IAS 21 dan PSAK 10 menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan dan dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan. Perusahaan dapat mengatasi risiko nilai tukar dengan metode yang sesuai dengan standar ini, yang meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor terhadap keputusan ekonomi yang dibuat. Bagi perusahaan multinasional dan pengguna laporan keuangan yang memerlukan perbandingan kinerja perusahaan global, penerapan IAS 21 membantu harmonisasi pelaporan keuangan lintas negara. Dengan aturan yang ketat dan rinci, kedua standar ini meningkatkan transparansi, memudahkan pengguna, dan mendukung kelancaran investasi dan pengambilan keputusan ekonomi yang lebih cerdas di berbagai yurisdiksi.

Pada akhirnya, di dunia yang semakin terhubung, PSAK 10 dan IAS 21 membantu menciptakan lingkungan akuntansi yang lebih adil. Standar ini memungkinkan bisnis untuk memberikan informasi yang jujur dan tepat mengenai pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing, hal ini menjadikan laporan keuangan sebagai alat yang efektif untuk menunjukkan posisi dan kinerja keuangan yang sebenarnya. Organisasi dapat meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan publik, dan meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pemangku kepentingan di dalam negeri maupun di kancah internasional dalam ekonomi global yang dinamis dan berubah-ubah jika memiliki PSAK 10 dan IAS 21.

REFERENSI

- [1] Susilawati, S. (2024). Penerapan PSAK 10 atas selisih kurs dan transaksi mata uang asing pada laporan keuangan PT Super Energy Tbk (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- [2] Prameswary, A. D., & Asyik, N. F. (2021). Penerapan psak no. 10 atas selisih kurs dan transaksi mata uang asing serta pengaruhnya pada laporan keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(12).
- [3] Jihan, M., Woro, L., & Ajeng, R. (2024). Analisis Selisih Nilai Tukar dan Transaksi Mata Uang Asing Pada PT Indofarma Tbk dan Entitas Anak. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(1), 189-200.
- [4] Wulandari, R., Wiyanti, R., Adiwibowo, A. S., & Septiani, D. (2022). *Akuntansi Keuangan Lanjutan 1*.
- [5] Mankiw, N. G. (2008). *Macroeconomics*. New York: Worth Publishers.

- [6] Pratiwi, D. F., Asliana, E., & Nurmala, N. (2021). Penerapan PSAK 10 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Transaksi Valuta Asing untuk Menunjang Kewajaran Laporan Keuangan PT JFI. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 15(1), 1-10.
- [7] Ruslin, Sparta, Ningsih, W., Anggraini, L., Soedarwati, E., Purwanti, D., Purwati, A. S. M., Ungkari, M. D., Marietza, F., Januarsi, Y., Rahayu, E. N. P., Deviarti, H., Lagu, B. A., Sinaga, I., & Habiburrochman. (2023). *Akuntansi Keuangan Lanjutan*.
- [8] Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2014). PSAK 10: Perubahan Kurs Valuta Asing. Diakses dari iaiglobal.or.id.
- [9] IAS Plus. (2009). IAS 21: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. Retrived from www.iasplus.com.
- [10] International Accounting Standards Board (IASB). (2024). IAS 21: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. Retrieved from ifrs.org.